

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pemilihan umum yaitu tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk menjadi Calon Legislatif. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan, 1). Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Jambi dan, 2). Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Jambi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis empiris, artinya penelitian berupa studi lapangan yang berbasis data primer untuk menemukan teori tentang proses terjadinya hukum dan proses beroperasinya hukum. Hasil penelitian ini bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Jambi dilakukan bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sentra Gakkumdu ini terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) provinsi berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pemilihan umum di wilayah provinsi. Adapun kendala penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum yaitu kurangnya bukti yang kuat, kurangnya keterangan dan kehadiran saksi, kurangnya rasa peduli masyarakat, dan terbatasnya waktu penanganan pelanggaran.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum Pidana, Tindak pidana Pemalsuan Dokumen, Pemilihan Umum,*

ABSTRACT

One of the problems that arises in general elections is the criminal act of falsifying documents in general elections carried out by people who aim to become legislative candidates. This is regulated in the Criminal Code and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This research aims 1). To determine the enforcement of criminal law against criminal acts of falsifying documents in general elections in General Election Supervisory Body Jambi Province and, 2). To determine the obstacles in enforcing criminal law against criminal acts of falsifying documents in general elections in General Election Supervisory Body Jambi Province. The type of research used in writing this thesis is empirical juridical, meaning research in the form of field studies based on primary data to find theories about the process of legal occurrence and the process of legal operation. The results of this research show that criminal law enforcement against criminal acts of falsifying documents in general elections in the General Election Supervisory Body Jambi Province is carried out together with the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). The Gakkumdu Center consists of the Prosecutor's Office, Police and General Election Supervisory Body. The provincial Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) has the authority to handle suspected general election crimes in the province. The obstacles to criminal law enforcement regarding the crime of falsifying documents in general elections are the lack of strong evidence, lack of information and the presence of witnesses, lack of public concern, and limited time to handle violations.

KEYWORDS: *Enforcement of criminal law, criminal act of falsifying documents, general elections*